

KEKUASAAN JURAGAN DAN KIAI DI MADURA

M. Imam Zamroni

*(Penulis adalah alumni program Magister Studi Sosiologi
Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta)*

Abstrak:

Tulisan ini berusaha untuk melihat kekuasaan dan pengaruh sosial yang ditimbulkan antara juragan dan kiai dalam perkembangan paling mutakhir. Keduanya—juragan dan kiai—mempunyai sumber kekuasaan yang berbeda yang berimplikasi pada keragaman desain gerakan politik untuk merebut kekuasaan. Berdasarkan pada kompleksitas bangunan kekuasaan yang dimiliki oleh elite, maka Madura memiliki karakter masyarakat yang unik sekaligus spesifik, jika dibandingkan dengan masyarakat Jawa pada umumnya. Oleh karena itulah, dalam konteks kekuasaan, kajian tentang juragan dan kiai menjadi penting adanya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yang berusaha memahami makna di balik fenomena sosial yang muncul ke permukaan secara holistik. Teknik penggalan data menggunakan AN Klobservasi partisipasi (participant observation) dan wawancara mendalam (indept interview)

Kata kunci:

kekuasaan, politik, budaya

Pendahuluan

Setiap pergantian struktur kekuasaan pada level elite selalu berekses pada perubahan-perubahan sosial, politik, bahkan sampai budaya masyarakat yang bersangkutan. Hal itu terbukti dengan berakhirnya era kolonialisme di Indonesia yang mampu berkuasa kurang lebih selama tiga setengah abad yang diteruskan pada era Soekarno dengan gagasan demokrasi terpimpin. Dengan jatuhnya Soekarno tampillah sesosok penguasa baru yang menerapkan sistem sentralistik bahkan terkenal dengan otoritarianisme, yaitu Soeharto. Pasca jatuhnya rezim otoriter Soeharto

diterapkanlah sistem desentralisasi dan otonomi daerah yang memberikan "ruang" yang lebih longgar kepada daerah untuk mengelola sumber daya-sumber daya secara lebih optimal, dengan impian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berkat perubahan tersebut, penguasa lokal memperoleh kesempatan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk "menangkap" jabatan-jabatan dan lembaga negara.¹ Kekuasaan kiai dan juragan

¹ John T Sidel, 2005, "Bosisme dan Demokrasi di Filipina, Thailand dan Indonesia; Menuju Kerangka Analisis Baru Tentang "Orang Kuat Lokal", dalam John Harriss (ed), *Politisasi Demokrasi Politik Lokal Baru*, Jakarta, Demos, hlm. 95.

mencuat ke permukaan dengan basis sosial, ekonomi dan religi yang sudah dimilikinya.

Singkatnya, dinamika perubahan sosial-politik dan budaya selama beberapa abad terakhir, mempunyai latar belakang historis yang mendalam. Seperti halnya lengsernya Soeharto, 21 Mei 1998, tonggak sejarah dipegang oleh gerakan mahasiswa, krisis ekonomi yang melanda Indonesia dan situasi perpolitikan yang tidak menentu. Pasca era transisi yang berlangsung ± 32 tahun, Indonesia memulai dengan babak baru untuk menciptakan pemerintahan yang lebih demokratis, meminjam istilah Larry Diamond (2003) untuk menciptakan iklim konsolidasi demokrasi (*consolidated democracy*). Tak ayal, pada pemilihan umum (Pemilu) tahun 1999, sebagai langkah awal untuk menciptakan iklim yang lebih demokratis, dimeriahkan dengan banyaknya partai politik baru. Meski masih terkesan prosedural, hal itu adalah investasi politik yang amat berharga bagi perkembangan demokrasi di Madura.

Situasi tersebut mendorong kemunculan aktor-aktor politik baru dengan basis sosial yang beragam, seperti, juragan, tauke, bandol, kiai, blater dan masyarakat sipil, semua berpartisipasi dalam memperebutkan kekuasaan politik. Fenomena tersebut terjadi baik di tingkat nasional maupun lokal kabupaten/kota. Pasca tumbangannya rezim otoriter Soeharto, dunia perpolitikan juga ditandai dengan "bangkitnya" juragan sebagai elite ekonomi. Para *juragan* tersebut melakukan gerakan politiknya dengan berbagai macam strategi untuk memperebutkan kekuasaan politik, guna mengawal kebijakan-kebijakan yang terkait dengan usaha yang ditekuninya. Semua itu, tidak lain karena semakin terbukanya ruang untuk mengekspresikan naluri berpolitik. Tak berlebihan jika dikatakan bahwa kiai di Madura saat ini

mempunyai "lawan" yang seimbang di dunia politik.

Kepiawaian berpolitik dalam kelompok elite, baik kiai maupun *juragan* di Madura hampir bisa dipastikan berorientasi pada perebutan kekuasaan. Upaya untuk membangun kultur politik di masyarakat dengan orientasi menciptakan iklim yang lebih demokratis, tidaklah menjadi prioritas utama dalam perilaku politik elite ekonomi atau *juragan* yang mengedepankan kekuasaan ekonomi sebagai basis gerakan politiknya, begitu pula dengan kiai yang menggunakan kekuatan agama sebagai busur sosial untuk menggerakkan massa yang masih mempercayai, bahwa sesosok kiai mempunyai kelebihan-kelebihan spiritual dan mempunyai hubungan relatif dengan Sang Adikodrati. *Sahdan*, dalam mengiringi perubahan sistem ketata-negaraan, sistem perpolitikan di tingkatan lokal juga mengalami perubahan yang mendasar, terutama dalam kasus kiai dan *juragan* di Madura. Meski di Madura sendiri tidak hanya terdapat dua sosok elite yang amat berpengaruh di masyarakat.

Secara spesifik di Madura terdapat beberapa tipologi elite lokal, seperti, kiai, *blater*, *klébon* (kepala desa), *aria/sentana* (bangsawan), birokrat, politisi lokal, cendekiawan, *oréng sogi*, *tauke*, *juragan*, dan *bandol*.² Masing-masing tipologi elite

²Abdur Rozaki, 2004, *Menabur Kharisma Menuai Kuasa; Kiprah Kyai dan Blater Sebagai Rezim Kembar di Madura*, Yogyakarta; Pustaka Marwa, hlm. 9; Latief Wiyata, 2002, *Carok; Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*, Yogyakarta, LKiS.

; Kuntowijoyo, 2002, *Perubahan Sosial Dalam Masyarakat Agraris; Madura 1850-1940*, Yogyakarta, Matabangsa.

; Elly Touwen-Bouwisma, 1989, "Kepala Desa Madura; Dari Boneka ke Wiraswasta", dalam, Huub De Jonge (ed), *Agama, Kebudayaan, dan Ekonomi; Studi-Studi Interdisipliner Tentang Masyarakat Madura*, Jakarta, Rajawali Press; Iik Arifin Mansurnoor, 1987, *Ulama, Villagers and Change; Islam in Central Madura*, Kanada, Institute of Islamic Studies McGill University; Huub De Jonge, 1989, *Madura dalam Empat Zaman; Pedagang Perkembangan Ekonomi dan Islam; Suatu Studi Antropologi Ekonomi*, Jakarta, PT. Gramedia.

tersebut mempunyai peran sosial dalam masyarakat yang didasarkan pada sumber-sumber kekuasaan masing-masing. Modalitas yang dimiliki oleh para elite juga beragam, yang membawa implikasi pada kokohnya bangunan kekuasaan dan mampu menjadi instrumen untuk menggerakkan massa dalam proses sosial tertentu. Menyimak beberapa kasus Pilkada di Madura, para kiai masih berperan sebagai broker politik (*political broker*) yang mampu dikendalikan oleh pengusaha maupun *juragan* dengan kapital ekonominya.

Sebagai contoh *juragan* yang terjaring dalam mata rantai perdagangan tembakau di Madura terdiri dari—*juragan*, *tauke*, *bandol*, dan *tengkulak*—bangunan kekuasaan di antara beberapa aktor tersebut didasarkan pada aspek sosial-ekonomi yang diperkokoh dengan kontrak sosial dalam perdagangan tembakau. Besarnya kapital ekonomi juga sangat mempengaruhi kualitas kekuasaan yang melekat dalam diri seseorang. Meski dalam konteks yang berbeda, hal ini searus dengan kekuatan kharisma yang dimiliki oleh seorang kiai, semakin kharismatik maka, kekuasaan yang melekat pada kiai juga semakin kokoh.³ Relasi kekuasaan yang terbangun dalam *juragan* tembakau, ternyata tidak semata-mata berorientasi pada penge-rukan keuntungan ekonomi, akan tetapi dalam wilayah politik bangunan relasi kekuasaan juga berperan penting di dalamnya. Kasus Pilkada maupun Pilkades menjadi contoh nyata yang melibatkan aktor-aktor dalam jaringan perdagangan tembakau dan kiai di Madura.

Meskipun kiai dan *juragan* selalu memiliki kekuasaan dan pengaruh sosial, akan tetapi pada era Orde Baru mereka tidak leluasa mengekspresikan kebebasan berpolitik, karena ruang yang amat terbatas.

Sentralisasi kekuasaan mengakibatkan kerdilnya dinamika perpolitikan di tingkat lokal. Karena kekuasaan negara yang terlalu kuat, untuk mengontrol dinamika perpolitikan pada aras lokal kabupaten/kota atau gerakan sosial masyarakat akar rumput (*strong state weak society*) menjadi tidak berkembang.⁴ Akibatnya, dalam dunia perpolitikan, pergolakan antar elite untuk memperebutkan kekuasaan atau jabatan-jabatan strategis dalam birokrasi di Madura tidaklah terlalu ketat. Dinamika perpolitikan di Pulau Garam pun tidak menunjukkan perkembangan yang berarti akibat represifitas rezim otoriter yang mampu berkuasa selama ± 32 tahun.

Berangkat dari pemaparan latar belakang masalah di atas, maka tulisan ini berusaha untuk melihat kekuasaan dan pengaruh sosial yang ditimbulkan antara *juragan* dan kiai dalam perkembangan paling mutakhir. Keduanya—*juragan* dan kiai—mempunyai sumber kekuasaan yang berbeda yang berimplikasi pada keragaman desain gerakan politik untuk merebut kekuasaan. Berdasarkan pada kompleksitas bangunan kekuasaan yang dimiliki oleh elite, maka Madura memiliki karakter masyarakat yang unik sekaligus spesifik, jika dibandingkan dengan masyarakat Jawa pada umumnya. Oleh karena itulah, dalam konteks kekuasaan, kajian tentang *juragan* dan kiai menjadi penting adanya. Fokus penelitian dirumuskan dengan pertanyaan pokok; apa sajakah sumber-sumber kekuasaan *juragan* dan kiai dan bagaimana kekuasaan tersebut diorganisir, sehingga menjadi basis gerakan politik dan kebudayaan dalam masyarakat Madura?. Berawal dari perubahan struktur politik di tingkat nasional, apakah membawa

³Hiroko Horikoshi, 1987, *Kyai dan Perubahan Sosial* (Jakarta, P3M); Mansurnoor, *Ulama, Villagers and Change*;

⁴Daniel Dhakedae, 2003, *Cendekiawan dan Kekuasaan Dalam Negara Orde Baru*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama; Vedi R. Hadiz, 2005, *Dinamika Kekuasaan Ekonomi Politik Indonesia pasca Soeharto*, Jakarta, LP3ES.

implikasi sosial-politik terhadap eksistensi *juragan* dan kiai di Madura?. Dua pertanyaan itulah yang mendasari penelitian ini.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yang berusaha memahami makna di balik fenomena sosial yang muncul ke permukaan secara holistik.⁵ Dengan menggunakan logika fenomenologi, penelitian ini berusaha untuk melihat kekuasaan antara *juragan* dan kiai dalam perdagangan tembakau dan politik lokal di Madura. Melihat aktor-aktor pedagang tembakau tentunya tidak bisa secara parsial, namun harus dengan pendekatan holistik. Sama halnya dengan mendeskripsikan aktor-aktor politik yang salah satunya adalah kiai.

Teknik penggalan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipasi (*participant observation*) dan wawancara mendalam (*indepth interview*). Dalam hal ini, peneliti terlibat secara langsung dalam konsolidasi politik yang dilakukan oleh tokoh yang berkepentingan dengan beberapa kiai kharismatik yang mempunyai pengaruh sosial. Terkadang peneliti tidak berperan sebagaimana laiknya seorang peneliti, namun lebih mirip sebagai politikus. Meskipun demikian, validitas data penelitian yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan

Dalam konteks yang berbeda—seperti kasus *juragan*—penelusuran informan penelitian dilakukan dengan cara *snow ball*, proses penelusuran informan yang berpijak pada logika efek bola salju. Untuk memperkuat validitas data penelitian juga didukung dengan dokumentasi. Karena isu

politik yang bersifat konspiratif harus didukung dengan data sekunder seperti yang ada pada media masa lokal, maupun dokumentasi lainnya.

Kerangka Teori

Istilah elite lazim didefinisikan sebagai suatu kelompok kecil (*the ruling class*) dalam masyarakat yang tergolong disegani, dihormati, berkuasa dan mempunyai pengaruh sosial. Kelompok minoritas ini mampu menduduki posisi-posisi penting, memiliki kemampuan mengendalikan kegiatan ekonomi dan politik, serta berpengaruh terhadap proses pengambilan keputusan-keputusan krusial yang menyangkut hajat hidup orang banyak.⁶ Di samping itu, terkadang juga melahirkan organisasi-organisasi, aturan-aturan serta peranan yang ditunjang oleh suatu sistem tradisi untuk memenuhi kebutuhannya. Sementara dalam bidang yang lain juga terdapat organisasi-organisasi yang menghimpun, mengatur serta menyalurkan kekuatan-kekuatan sosial melewati hirarki yang kuat.⁷

Salah satu hal penting yang mempengaruhi dinamika kemunculan elite adalah cara menjalankan kekuasaannya, karena tidak adanya kerangka teoritis yang sangat tepat untuk suatu sintesa dari generalisasi-generalisasi empiris yang terpisah. Sikap, ideologi-ideologi para elite, relasi sosial-politik dan ekonomi, tentunya tidak kalah penting dengan latar belakang sosial pembentukan dalam pergulatan

⁵Noeng Muhadjir, 1998, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta, Rake Sarasin.

⁶ Hadiz, *Dinamika Kekuasaan Ekonomi Politik Indonesia pasca Soeharto*.

⁷C. Wright Mills, 1956, *The Power Elite*, New York, Oxford University Press.

; Suzanne Keller, 1995, *Penguasa dan Kelompok Elite; Peranan Elite-Penentu Dalam Masyarakat Modern*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

; Bottomore, T.B., 2006, *Elite dan Masyarakat*, Jakarta, Akbar Tandjung Institut, 2006)

kelompok elite.⁸ Dalam konteks sejarah elite Robert Van Niel (1984)⁹ dan Clifford Geertz (1989)¹⁰ menegaskan bahwa pada tahun 1900, sumber-sumber kekuasaan elite pedesaan didasarkan atas kepemilikan tanah yang luas. Artinya, pada era tersebut, secara sosiologis kepemilikan materi berupa tanah yang luas turut menentukan tingkat kelas sosial seseorang. Akan tetapi konteks sosial historis tersebut telah mengalami perkembangan yang amat kompleks, sehingga saat ini kekuatan kapital tidak hanya bertumpu pada penguasaan tanah saja.

Seperti faktor geneologis juga turut mengukuhkan kekuasaan elite, misalnya seseorang yang lahir di tengah keluarga yang berkuasa (golongan Priyayi), maka kekuasaan pribadi secara otomatis akan dimilikinya.¹¹ Namun tingkat kekuasaannya juga sangat beragam. Dalam perspektif C. Wright Mills (1965),¹² elite dikelompokkan menjadi tiga, *pertama*, para konglomerat (*the major corporations*), atau orang yang mempunyai kekayaan ekonomi yang berlimpah seperti *juragan*. *Kedua*, pimpinan militer (*the military*), mereka yang mempunyai kekuasaan untuk melakukan kontrol sosial (*social control*) secara legal dan merupakan kepanjangan tangan dari negara. *Ketiga*, tokoh politik pemerintah (*the federal government*), orang-orang yang memiliki posisi penting di pemerintahan dan sangat berpengaruh terhadap penciptaan regulasi yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Dalam lingkaran kekuasaan elite,

konglomerat mempunyai peran yang sangat signifikan, tak terkecuali dalam menentukan kebijakan-kebijakan dalam skala lokal maupun nasional. Baik mereka yang termasuk dalam lingkaran struktur birokrasi maupun di luar struktur birokrasi di Madura.

Secara lebih spesifik, kategorisasi yang digagas oleh Mills (1956)¹³ tentang kelompok elite berbeda dengan yang dilakukan oleh Keller (1995),¹⁴ yang menggolongkan kelompok elite menjadi elite ekonomi, politik, dan "golongan tinggi", yang terbentuk dari individu-individu yang berlainan dan memakai pola pembinaan yang berlainan pula. Sebagian peneliti mempertahankannya dengan bukti-bukti yang mendukung, bahwa elite bisnis menguasai pentas setempat; yang lainnya berpendapat, bahwa beberapa elite berbagi kekuasaan dalam sirkulasi elite.¹⁵ Dalam konstelasi politik kekuasaan ekonomi menduduki posisi yang paling menentukan, namun dalam realitas masyarakat Madura, hampir seluruh kiai berperan sebagai pialang politik. Mungkin kelompok ini sebagai media komunikasi politik yang paling efektif untuk agitasi dan propaganda dalam penggalangan massa dengan menggunakan dalih-dalih agama. Kuatnya ritual Islam yang terintegrasi dengan tradisi setempat merupakan fenomena sosial-agama yang tidak bisa dipungkiri.

Seiring dengan perkembangan zaman pengertian elite mengalami polarisasi, terlebih pasca tumbangannya rezim Orde Baru. Muncul berbagai keinginan pemerintah lokal (*local state*) untuk mendapatkan otonomi yang lebih luas yang menandakan bangkitnya kekuatan-kekuatan oligarkis di

⁸ Keller, *Penguasa dan Kelompok Elite*.

⁹Robert Van Niel, 1984, *Munculnya Elite Modern Indonesia*, Jakarta, PT. Dunia Pustaka Jaya.

¹⁰Clifford Geertz, 1989b, *Abangan, Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*, Jakarta, Pustaka Jaya.

¹¹Clifford Geertz, 1989a, *Penjaja dan Raja; Perubahan Sosial dan Modernisasi Ekonomi di Dua Kota Indonesia* Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.

¹²C. Wright Mills, 1956, *The Power Elite*, New York, Oxford University Press.

¹³ibid.

¹⁴ Keller, *Penguasa dan Kelompok Elite*.

¹⁵ibid.

tingkat lokal.¹⁶ Bagaimana tidak, kran kebebasan telah terbuka bersamaan dengan tumbangnya rezim otoriter tersebut. Runtuhnya otoritas negara yang sangat sentralistik, telah memunculkan berbagai agenda yang berlawanan dan kini saling bersaing, di mana terdapat pula peluang-peluang bagi kepentingan serta kekuatan populis dan lokal untuk memapankan diri dalam spektrum kekuasaan, khususnya dalam konteks desentralisasi.¹⁷ Dalam kajian ekonomi politik di Madura, *juragan* merupakan "aktor-aktor baru" yang turut mewarnai dinamika perpolitikan, seperti halnya dalam proses demokrasi lokal. Pilkada yang dilakukan di seluruh wilayah Nusantara ini diwarnai dengan maraknya kasus *money politics*. Ini menandakan bahwa, kekuatan kapital semakin digdaya.

Singkatnya basis struktur dimensi-dimensi kekuasaan elite adalah modal ekonomi yang memiliki varian berbeda-beda—modal kultural, modal sosial, dan modal religi—merupakan bentuk yang diambil dari berbagai spesies modal, ketika modal itu dipandang dan diakui sebagai yang absah. Terdapat dua kemungkinan yang dapat dipakai untuk melihat kekuasaan. *Pertama*, kekuasaan dilihat sebagai sesuatu barang jadi sebagai suatu substansi. *Kedua* kekuasaan dilihat sebagai relasi, suatu pola hubungan dengan semua konsekuensinya.¹⁸ Relasi *tauke*, *juragan*, dan *bandol* dalam perdagangan tembakau merupakan bentuk dari relasi kekuasaan, dalam hal ini basis struktur kekuasaan adalah kapital ekonomi. Teori pertama

senada dengan pendapat Anderson, kekuasaan merupakan hal yang konkret; kekuasaan bukan merupakan postulat teoritis akan tetapi suatu kenyataan eksistensial.¹⁹ Begitu pula ketika seseorang berbicara tentang kiai, tidak akan terlepas dari perbincangan dengan kekuasaan, yang berbenturan dengan otoritas kharismatis dan simbol agama yang bersifat personal.

Searus dengan itu, dalam perjalanannya baik *juragan* maupun kiai mampu membentuk pemaknaan tertentu tentang kategori sosial politik dan agama. Elite ekonomi selain memiliki modal berupa kekayaan material, juga diperkuat dengan *cultural capital*. Singkatnya dalam skala elite, sumber-sumber kekuasaan terus mengalami rotasi, mengalihkan ide jadi barang, mengalihkan barang menjadi harta, harta menjadi modal dan mengalihkan modal menjadi kekuasaan, pada siklus yang hampir-hampir tidak pernah terputus.²⁰ Melalui berbagai strategi dan cara yang ditempuh oleh masing-masing elite dalam konteks sosial yang melingkupinya, dalam situasi sosial budaya yang amat kompleks, relasi kekuasaan yang dibangun dalam aktor-aktor perdagangan tembakau di Madura kental dengan nuansa sosial-politik dan ekonomi.

Demikian kokohnya eksistensi juragan yang berakar jaminan dan pertahanan terhadap hak pemilikan swasta di dalam dunia kapitalis yang dalam analisis ekonomi politik, sehingga mendorong untuk diperlakukan sebagai suatu faktor struktural,²¹ meskipun mereka berada di luar struktur, namun tak jarang mereka juga berperan sebagai aktor-aktor sosial yang

¹⁶ Hadiz, *Dinamika Kekuasaan Ekonomi Politik Indonesia pasca Soeharto*.

¹⁷Ibid.

¹⁸Benedict Anderson, 1990, *Language and Power; Exploring Political Cultures in Indonesia*, Cornell University Press, 1990) ; Pierre Bourdieu, 1994, *In Other Words; Essays Towards a Reflexive Sociology*, Cambridge, Polity Press. ; Daniel Dhakedae, 2003, *Cendekiawan dan Kekuasaan Dalam Negara Orde Baru*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.

¹⁹Ibid.

²⁰Dhakedae, *Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru*.

²¹Jeffrey A Winters, 1999, *Power in Motion; Modal Berpindah, Modal Berkuasa Mobilitas Investasi dan Politik di Indonesia*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, hlm. 9.

sangat berpengaruh baik pada tingkat birokrasi maupun masyarakat. Terkait dengan konteks lokal Madura, kajian kekuasaan elite ekonomi difokuskan pada para pedagang tembakau yang terdiri dari *tauke*, *juragan* dan *bandol*, dengan melibatkan kiai sebagai elite agama yang mempunyai pengaruh sosial dan sekaligus ekonomi. Pemilihan ini didasarkan pada realitas sosial kepulauan Madura sebagai penghasil tembakau yang memiliki karakter yang spesifik, sehingga secara otomatis memunculkan para pelaku pasar atau aktor-aktor kapitalis lokal. Pasca tumbanganya Orde Baru, mereka juga banyak yang terlibat dalam dunia politik pada level kabupaten/kota. *Juragan*, sebagai pelaku ekonomi merupakan manifestasi kapitalis lokal dengan varian yang berbeda-beda. Sedangkan, kiai berperan sebagai elite kultural dan agama yang hampir selalu terlibat dalam politik praktis.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sebagai bahan reflektif, pasca kemerdekaan tahun 1945, Indonesia memasuki masa transisi pertama yang diprakarsai oleh Soekarno. Namun era transisi itu tidak tuntas, karena bangsa Indonesia kemudian memasuki era otoritarianisme yang dipimpin oleh Soeharto selama ± 32 tahun, akibatnya masyarakat tidak pernah mandiri secara politik. Dengan tumbanganya rezim Soeharto pada tahun 1998, Indonesia memasuki babak sejarah baru. Penerapan sistem desentralisasi memberikan peluang yang seluas-luasnya kepada daerah untuk mengelola sumber daya dan optimalisasi potensi lokal yang ada. Tak ayal, seluruh kabupaten yang ada seolah-olah membentuk kerajaan-kerajaan kecil yang dipimpin oleh seorang raja atau elite lokal dalam sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai

manifestasi untuk menciptakan demokrasi di tingkat lokal. Partai Golkar yang dahulu dijadikan sebagai mesin politik pemerintah, berangsur-angsur mengalami penurunan dalam perolehan suara di Madura. Situasi tersebut sekaligus mendorong tampilnya elite-elite lokal baru dalam pentas politik untuk "bertarung" memperebutkan jabatan-jabatan strategis seperti Bupati, anggota DPRD maupun *klébon*, dengan berbagai macam modal yang dimilikinya.

Di Madura terdapat fenomena sosial yang muncul ke permukaan terkait dengan semakin mencuatnya peran *juragan* dan kiai sebagai suatu kelas sosial yang sangat berpengaruh di masyarakat. Di dunia politik saat ini kiai mempunyai "lawan" yang seimbang yaitu, *juragan* dengan kekayaan materialnya sebagai basis gerakan sosial politik dan seluruh perangkatnya, *bandol* dan *tengkulak*, yang mampu berperan sebagai sistem sosial untuk membentuk suatu bangunan kekuasaan yang bersifat relasional. Berikut ini dijelaskan beberapa aspek kekuasaan *juragan* dan kiai di Madura.

Kekuasaan Kiai

Pada era Orde Baru berkuasa kiai di Madura mampu mengendalikan seluruh *santréh*, *bindhéreh*, wali santri, serta masyarakat yang ada di sekitarnya untuk "menyatukan suara" dalam ritual lima tahunan yang disebut Pemilu. Di bawah kekuasaan kiai, mereka tidak mempunyai kebebasan untuk menentukan pilihan yang terbaik menurut versinya. Adalah suatu kewajiban jika seorang politisi selalu berusaha mendekatkan dirinya kepada kiai untuk memperoleh dukungan yang kuat, karena rakyat saat itu ibarat satu suara dengan kiai yang memimpinnnya. Menjelang pemilu, banyak politisi yang *nyabis* ke rumah kiai dengan berbagai macam dalih dan janji politik yang menjadi bius sosial.

Peran sosial keagamaan kiai di Madura menandakan bahwa sampai sekarang ini kiai masih menjadi ikon sosial dalam masyarakat, meski loyalitas masyarakat telah mengalami pergeseran-pergeseran yang amat berarti untuk perubahan sosial.

Berdasarkan pengamatan terlibat (*partisipant observation*) yang penulis lakukan dengan beberapa politisi di Madura, fenomena itu mengalami pergeseran yang berarti, saat ini bukan seorang politisi yang berusaha mendekati diri kepada kiai, namun malah justru sebaliknya. Ketika menjelang Pilkada seorang kiai di Madura terus mencari peluang-peluang politik (*political opportunities*) untuk menjalin kontrak sosial politik terhadap calon tertentu. Tak ayal, di akhir pertemuan politik tersebut mereka biasanya menyebutkan permasalahan yang terkait dengan kapital, dan terus berharap akan adanya perubahan bagi kemaslahatan masyarakat Madura. Namun tak jarang kiai juga hanya berorientasi pada akumulasi kekuasaan yang sudah terbangun dalam dirinya. Ketika calon yang diusung mampu menduduki kekuasaan politik, maka kedigdayaan seorang kiai akan bertambah, meski mereka tetap berada di luar struktur kekuasaan.

Dalam keterlibatannya di dunia politik, sampai saat ini kiai masih mengandalkan loyalitas masyarakat akar rumput yang layak "dijual" kepada seorang calon dan relasi sosial yang dibangun antar sesama kiai Madura dalam lingkup yang sangat lokal, bahkan terkesan terkotak-kotak yang amat potensial memunculkan konflik antar kiai. Di beberapa daerah di Madura, akibat perpolitikan, kiai terpecah-pecah, solidaritas antar kiai di Madura mudah terbelah oleh kepentingan politik. Pendeknya, persaudaraan dalam agama Islam yang seringkali didengung-dengungkan terkikis dengan kepentingan

para tokohnya. Tak berlebihan jika dikatakan bahwa, apa yang digagas oleh Clifford Geertz (1960)²² tentang peran kiai sebagai pialang politik (*political broker*) semakin menguat di Madura dalam dua dekade terakhir.

Akibatnya muncul berbagai macam predikat yang dilekatkan kepada kiai, tatkala tokoh agama itu mempunyai peran ganda bahkan multiperan. Seperti kiai *rajeh*, kiai *kene'*, kiai *langgér*, kiai *dhokun* dan kiai politik. Dari sinilah kita tahu bahwa, secara sosiologis, munculnya kiai merupakan hasil dari reproduksi sosial yang didukung oleh faktor geneologis dan penguasaan pengetahuan keagamaan yang dimiliki oleh seseorang. Akan tetapi terdapat juga beberapa justifikasi yang memperkokoh posisi sosial yang diduduki kiai di Madura yaitu kepemilikan santri yang banyak, telah melaksanakan ibadah haji ke Makah dan penggunaan simbol-simbol keagamaan. Kepercayaan rakyat akan semakin terpatri, jika kemampuan penguasaan pengetahuan agamanya dilengkapi dengan keahlian mengobati penyakit masyarakat dengan pendekatan agama.

Terlepas dari semua itu, sebutan kiai politik mengindikasikan keterlibatan mereka dalam dunia politik yang menyebabkan semakin mudarnya kharisma seorang kiai di mata rakyat. Ekses negatif ini tentunya tidak dirasakan oleh kiai yang terlibat dalam perpolitikan, akan tetapi hampir seluruh kiai menerima imbasnya. Para kiai yang tidak berpolitik pun merasakan lunturnya loyalitas yang dahulu sudah terpatri dan tertanam sangat kuat. Kita tahu bahwa, rakyat Madura selalu berpegang teguh pada slogan *Buppa, Babbu, Guru, Rato*. Filosofi masyarakat itu berimplikasi pada peran sosial masing-masing tokoh yang

²²Clifford Geertz, *The Javanese Kijaji: The Changing Role of A Cultural Broker*, In: *Comparative Studies in Society and History*, Vol. 2, No. 2 (Jan., 1960), 228-249.

terdiferensiasi. Sehingga peran ganda kiai politik dinilai telah menyalahi koridor dan filosofi masyarakat Madura. Karakter sosial yang khas dan spesifik inilah yang tidak ditemui dalam masyarakat Jawa pada umumnya.

Maka, upaya untuk mengembalikannya peran sosial-keagamaan kiai di Madura merupakan strategi sosial yang cerdas. Terlebih untuk membentengi masyarakat dengan nilai-nilai agama Islam akibat derasnya arus industrialisasi di Madura. Tidak lama kemudian Jembatan Suramadu yang menghubungkan Madura dengan Surabaya akan menjadi penopang percepatan transformasi sosial. Kekuasaan kiai diorientasikan untuk menggalang perubahan sosial yang mampu memperkuat posisi sosialnya di masyarakat. Karena, sebuah tradisi kultural akan kehilangan kekuatannya kalau sudah dipersiapkan secara obyektivistik dan diterapkan dengan menggunakan strategi-strategi politik.²³

Kiai memang membutuhkan otoritas kultural dan agama, akan tetapi harus diorientasikan untuk transformasi sosial masyarakat Madura dan bukan untuk bertarung di medan politik yang seringkali menciptakan konflik dan disintegrasi sosial, ukhuwah islamiyah harus tetap menjadi garda terdepan dalam membangun masyarakat.

Kekuasaan Juragan

Predikat juragan dipandang dari kekayaan material yang dimilikinya seringkali digolongkan sebagai *oréng soghi* atau *oréng andhi*. Pasca Orde Baru mereka bangkit untuk berpartisipasi dalam pentas politik dengan modal ekonomi sebagai kekuatan penyangga gerakan politiknya.

Fenomena sosial politik yang paling mudah ditemukan keterlibatan *juragan* adalah dalam Pilkada. *Money politics* menjadi senjata pamungkas untuk merenggut massa sebanyak-banyaknya, dalam menduduki posisi kunci di tingkat desa. Strategi ini adalah bagian dari upaya untuk mengawal kebijakan-kebijakan sosial ekonomi, terutama yang terkait dengan eksistensi kerajaan bisnis yang dimilikinya. Biasanya mereka tidak hanya memiliki satu unit usaha saja, karena kerajaan bisnisnya terus mengalami ekspansi, seperti layaknya para kapitalis di tingkat lokal.

Pasca reformasi hampir di seluruh kepulauan Madura elite ekonomi bangkit, begitu pula dengan *juragan*. Karena, dengan memiliki kekuasaan politik dalam struktur birokrasi, juga akan mempermudah untuk melakukan akses sumber daya-sumber daya yang dimiliki oleh daerah dan melibatkan diri terhadap proyek-proyek dalam skala lokal. Singkatnya, meski duduk sebagai pejabat tertentu di pemerintahan, logika yang digunakan oleh para *juragan* adalah logika kapitalis, untuk mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya. Paling tidak, selama memangku jabatan, mereka mampu mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan. Ibarat membuka usaha, dana pencalonan merupakan investasi yang harus kembali, bahkan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Maka, wajar jika isu politik uang (*money politics*) mencuat ke permukaan dalam pesta demokrasi lokal di beberapa daerah di Indonesia ini. Artinya bahwa partisipasi politik mereka memang didasarkan pada kepemilikan modal ekonomi yang melimpah, karena modal ini yang akan membuat mereka semakin digdaya.

Ketika seorang *juragan* berniat mencalonkan sebagai bupati atau anggota DPRD, harus rela merogoh kocek dengan jumlah yang besar untuk biaya kampanye

²³Jürgen Habermas, 2004, *Krisis Legitimasi*, Yogyakarta, Qalam, hlm. 228

maupun lobi-lobi politik. Semua itu adalah demi kokohnya bangunan kekuasaan. Bahkan fenomena partai politik "menjual kursi jabatan" tidak ada yang perlu ditutup-tutupi lagi. Media masa terkadang juga turut mempublikasi harga kursi tersebut agar "cepat terbeli" oleh para pengusaha yang haus akan kekuasaan. Di sinilah awal mula tergesernya peran kiai dalam pentas politik oleh elite ekonomi di Madura. Karena kedua elite ini mempunyai basis kekuasaan yang berbeda dan saat ini kekuasaan ekonomilah yang digdaya, menimbulkan pengaruh sosial serta menjadi kekuatan penentu dalam segala aspek.

Hal ini mencerminkan betapa kekuasaan tidak hanya terletak di tangan aparatus negara dan politisi, melainkan juga di tangan para elite ekonomi yang lebih digdaya secara kapital. Adalah wajar, ketika seorang pemodal mampu menduduki kekuasaan struktural logika yang digunakan adalah logika ekonomi kapitalis yang ekspansionis dan akumulatif. Maka elite ekonomi di dalam birokrasi tetap saja disibukkan dengan agenda besar yakni akumulasi kekuasaan dan meraih keuntungan ekonomi sebesar-besarnya. Lebih dari itu adalah bagian dari strategi dagang untuk melindungi unit usaha-unit usaha yang ditekuninya dengan kewenangan-kewenangan yang dimiliki ketika memangku jabatan tertentu.

Selain modal ekonomi yang menjadi tumpuan partisipasi politiknya, upaya untuk menggandeng kiai sebagai elite agama dalam memperebutkan kekuasaan struktural menjadi strategi politik bagi *juragan* untuk menduduki kekuasaan struktural di tingkat lokal-Madura. Beberapa kasus yang terjadi di Madura menjelang Pilkada tahun 2004 menjadi bukti empirik yang tak terbantahkan. Ini semakin mengukuhkan tesis yang dibangun oleh Geertz (1960) bahwa kiai dahulu berperan

sebagai perantara kultural (*cultural broker*) dalam masyarakat. Begitu pula dengan haji yang mampu menjadi perantara kekuasaan dengan simbol-simbol agama yang dimilikinya. Saat ini kiai di Madura seolah-olah hanya sebagai kendaraan politik bagi para pengusaha, untuk menduduki kekuasaan struktural. Di sinilah letak kedigdayaan kapital ekonomi dalam struktur politik.

Pada ranah modalitas yang dimiliki oleh *juragan* juga amat kompleks. Ketika *juragan/oréng soghi* telah menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci, kewibawaan dan pengaruh sosialnya juga semakin menguat, bahkan mereka juga semakin disegani oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya. Singkatnya, simbol-simbol keagamaan dalam masyarakat Madura juga berperan sebagai sarana untuk mengukuhkan kedudukan sosial, *prestige*, dan membangun legitimasi kekuasaan. Tak bisa dipungkiri bahwa predikat haji bagi *juragan* mampu didapatkan dengan mudah. Haji juga mampu dijadikan sebagai perekat sosial dalam relasi kekuasaan antara *juragan* dan *bandol*, bahkan terkadang juga dengan *tauke* meski ia golongan orang-orang Cina yang notabene adalah orang non Islam. Dari sini dapat diketahui bahwa, modal ekonomi yang melimpah merupakan sumber kekuasaan yang pertama dan utama bagi mereka untuk mengukuhkan kekuasaan.²⁴

Ketaatan masyarakat terhadap sesosok elite yang dinilainya mempunyai kelebihan-kelebihan secara material maupun spiritual merupakan modal sosial (*social capital*) bagi akumulasi kekuasaan yang bersifat relasional. Dalam wilayah praksis, terbukanya ruang politik yang semakin longgar sebagai sarana untuk mengakses kekuasaan struktural, pasca rezim otoriter

²⁴Bourdieu, *In Other Words; Essays Towards a Reflexive Sociology*.

Soeharto, mendorong partisipasi politik *oréng soghi*. Kendati demikian, cara mereka mengekspresikan ke tengah publik tidaklah seragam. Sumber pengetahuan, kekuatan modal dan situasi sosial turut menentukan keragaman sosial. Modal ekonomi yang dimiliki oleh *juragan* terus mengalami perubahan-perubahan spesies modal yang semakin memperteguh bangunan kekuasaannya.²⁵ Teori tersebut terbukti dalam relasi kekuasaan antara *tauke*, *juragan* dan *bandol*, dalam mata rantai perdagangan tembakau Madura yang terkadang dalam prakteknya juga melibatkan kiai.

Relasi kekuasaan antara *tauke*, *juragan* dan *bandol* yang didasarkan pada ikatan kontrak sosial-ekonomi dalam perdagangan tembakau, sangat dipengaruhi oleh besaran modal ekonomi yang dimiliki oleh masing-masing individu. Begitu pula yang terjadi pada kelas *bandol* dan petani tembakau sebagai kelas sosial yang paling bawah atau sering disebut dengan *oréng duméh*. Secara sosiologis, ini menjadi kenyataan sosial dalam mata rantai perdagangan tembakau. Uniknyanya, relasi kekuasaan yang didasarkan pada kekuatan sosial-ekonomi tersebut mampu berubah menjadi sangat politis, ketika seorang *juragan* akan mencalonkan sebagai *klébon* atau bupati. Para *bandol* akan memberikan dukungan kepada *juragannya* untuk memperebutkan kekuasaan struktural pada level desa maupun pada level kabupaten/kota. Singkatnya relasi kekuasaan yang terbangun dalam mata rantai perdagangan tembakau bersifat sangat kompleks, kondisi sosial budaya masyarakat lokal turut memperteguh bangunan kekuasaan dalam aktor-aktor perdagangan tembakau di Madura.

²⁵Dhakedae, *Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru*.

Penutup

Dinamika kekuasaan pada *juragan* dalam mata rantai perdagangan tembakau di Madura—*tauke*, *bandol*, dan *tengkulak*—mengalami perubahan-perubahan signifikan yang didasarkan pada kekuatan kapital ekonomi yang dimiliki secara individual. Kekuatan kapital ekonomi sebagai penopang kokohnya bangunan kekuasaan seseorang dalam sistem perdagangan tembakau terkait dengan perubahan-perubahan yang semakin menguntungkan pemodal, seperti pengambilan contoh yang besar, fluktuasi harga tembakau, masuknya tembakau Jawa ke wilayah Madura pada musim panen, dan lain sebagainya. Hal itu sangat merugikan pedagang kecil seperti *bandol* tembakau. Pada posisi ini petani adalah kelompok yang paling dirugikan dan tidak mempunyai posisi tawar dengan para *juragan* dan *tauke* yang mempunyai modal besar. Singkatnya, dalam mata rantai perdagangan tembakau di Madura, petani tetap pada posisi yang termarginalkan oleh sistem yang tidak memihak mereka.

Relasi kekuasaan yang dibangun oleh *tauke*, *juragan*, dan *bandol* dalam perdagangan tembakau tidak hanya didasarkan pada kepemilikan materi yang melimpah, akan tetapi juga diperkuat dengan serangkaian kapital lainnya seperti; *kapital sosial*, berupa bangunan kepercayaan yang bersifat mengikat antara *bandol* dan *juragan*; *kapital budaya*, seperti kemampuan para *tauke* dan *juragan* dalam menyeleksi kualitas tembakau yang tidak bisa terbantahkan oleh siapapun; *kapital simbolik*, seperti penggunaan simbol-simbol keagamaan dalam perdagangan tembakau; dan yang terakhir adalah *kapital politik*, digunakan untuk melindungi unit usaha para pengusaha, seperti menjalin hubungan dengan kekuasaan politik.

Adapun pada ranah politik, pasca jatuhnya rezim otoriter Soeharto yang

diiringi dengan digulirkannya sistem desentralisasi, telah memberikan kewenangan dan sekaligus tanggung-jawab yang lebih luas kepada pemerintah daerah.

Dalam hal ini, para juragan di Madura menunjukkan perannya yang signifikan dengan kapital ekonomi yang dimilikinya. Kekuasaan dalam bidang ekonomi akan semakin digdaya, jika mereka mampu menduduki kekuasaan politik seperti jabatan struktural di pemerintahan. Disisi lain, kharisma *tauke*, *juragan*, dan *bandol* akan semakin kokoh, jika mereka telah melaksanakan ibadah haji ke Makah. Karena dalam masyarakat Madura, haji mempunyai makna sosial tersendiri. Uniknya, peran politik kiai mulai tergeser oleh elite ekonomi sebagai aktor-aktor baru dalam kancah perpolitikan di Madura. Padahal pada masa Orde Baru kiai mempunyai peran yang amat determinan

dalam dunia politik dan eksistensinya sangat diperhitungkan oleh para politisi.

Gerakan politik kiai dalam konteks lokal Madura mengalami pergeseran. Dahulu mereka amat disegani karena dipandang memiliki kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Sehingga banyak politisi yang *nyabis* untuk mendapatkan dukungannya dengan kontrak politik tertentu. Namun sekarang tidak sedikit kiai mencari dukungan terhadap orang yang secara definitif akan mencalonkan diri untuk menjadi pejabat penting di pemerintahan seperti Bupati. Sehingga untuk menganalisis keterlibatan kiai dalam dunia politik di Madura harus menggunakan logika terbalik. Meskipun teori ini tidak digeneralisasi empiris, fenomena tersebut telah mencuat ke permukaan. *Wa Allāh a'lam bi al-sawāb* □

